



Implementasi Investasi Swasta Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Luwu Raya

Implementation of Private Investment and Government Expenditure on Poverty Level in Luwu Raya

Vitha Wahida¹, Rian Maming², I Ketut Patra³

vithawahida@student.umpalopo.ac.id¹, rian_maming@umpalopo.ac.id², ketutpatra@umpalopo.ac.id³

Ekonomi Pembangunan

Universitass Muhammadiyah Palopo

Abstract

The purpose of this research is to identify and assess the role of private investment and public spending on the poverty rate in 2014-2021. The population used in this study, namely Luwu Raya Regency in South Sulawesi Province, was used as a sample. The data used in this study is secondary data provided as supporting information. The sampling method of this study uses several linear regression analysis methods, namely classical assumptions and time series data. The results of this study indicate that the independent variables of private investment and public spending do not simultaneously influence the dependent variable on the level of poverty in Luwu Raya.

Keywords: Private Investment, Government Spending, Poverty Rate

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menilai peran investasi swasta dan pengeluaran publik terhadap tingkat kemiskinan tahun 2014-2021. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kabupaten Luwu Raya di Provinsi Sulawesi Selatan digunakan sebagai sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diberikan sebagai informasi pendukung. Metode pengambilan sampel penelitian ini menggunakan beberapa metode analisis regresi linier yaitu asumsi klasik dan data *time series*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen investasi swasta dan belanja publik tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen tingkat kemiskinan di Luwu Raya.

Kata Kunci: Investasi Swasta, Pengeluaran Pemerintah, Tingkat Kemiskinan.

Correspondensi Author : Rian Maming

PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat membutuhkan investasi dari investor. Investasi ini sangat penting karena memungkinkan negara memperoleh tambahan modal yang akan digunakan untuk pembangunan dan selanjutnya mendukung pertumbuhan ekonomi. Investasi yang dibutuhkan Indonesia tidak hanya investasi publik, tetapi juga investasi sektor swasta di tingkat nasional dan internasional. Bangsa Indonesia saat ini sedang aktif berkembang, oleh karena itu investasi memegang peranan yang sangat penting dalam berjalannya perekonomian karena merupakan salah satu penentu dalam mensejahterakan masyarakatnya. Menurut (Nofiyani, 2018) investasi swasta merupakan inestasi yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya para pengusaha. Investasi semacam ini dapat dilakukan oleh perorangan atau perusahaan, seperti usaha mikro (yang belum memiliki badan hukum) atau Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Sebagian UKM sudah berbadan hukum, sedangkan usaha besar lainnya berbentuk PMA atau PMDN.

Investasi sektor swasta bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dan pendapatan dan didorong oleh motif peningkatan pendapatan. Jika pendapatan naik, konsumsi juga naik dan begitu juga permintaan aktual. Investasi yang dihasilkan dari peningkatan permintaan dan yang sumbernya adalah pendapatan tambahan disebut investasi yang diinduksi. Investasi swasta merupakan faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan untuk meningkatkan investasi swasta diperlukan

Peer reviewed under responsibility of Universitas Nisantara PGRI Kediri.

peran investasi dan pendapatan daerah. Jika nilai PAD suatu daerah meningkat maka dapat dikatakan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut juga tinggi. Ketika tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut tinggi, maka konsumsi di daerah tersebut cenderung tinggi. Menurut (Rizka Juita Rachim, 2013) investasi disebut juga investasi atau penanaman modal komponen penentu level lainnya adalah pembentukan modal total konsumsi. Kegiatan investasi dalam perekonomian dapat menaikkan dan menurunkan tingkat perekonomian Negara. Mustafa (2019) investasi ternyata tidak hanya memonopoli kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan swasta. Bentuk usaha ini dapat berupa kegiatan yang biasa dilakukan oleh pemerintah daerah dalam berbagai pengeluaran barang dan jasa, kegiatan investasi pada proyek infrastruktur, pengembangan sistem informasi dan penyediaan layanan kepada publik. Dilihat dari klasifikasi jenis investasi tersebut, kisaran investasi di daerah nampaknya cukup luas.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Ketika pemerintah menerapkan kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran publik mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Menurut (MS, 2017) kebijakan pengeluaran pemerintah yang secara langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi merupakan beban karena variabel ini diwujudkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial. pengembangan produksi negara diukur dari besarnya belanja langsung dan tidak langsung. Khamilah (2019) pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan laju investasi dan kesempatan kerja dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi dan pemerataan pendapatan. Dalam teori makro, pertumbuhan belanja/belanja publik diklasifikasikan oleh para ahli sebagai pembangunan dalam meningkatkan pengeluaran. Menurut (Harry A. P. Sitaniapessy, 2013) pengeluaran publik/ pemerintah adalah seperangkat produk yang dihasilkan yang mencakup keputusan atau keputusan pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa publik kepada masyarakat. Total pengeluaran pemerintah adalah jumlah keputusan anggaran yang dibuat oleh setiap tingkat pemerintahan (Pusat-Prop-Kabin/Kota). Menurut (Astuti, 2013) pengeluaran pemerintah dapat digunakan sebagai cerminan kebijakan pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah di setiap pembelian barang dan jasa untuk melaksanakan program mencerminkan jumlah uang yang diberikan pemerintah untuk melaksanakan program. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai sektor-sektor tersebut dalam ruang publik dan sosial. Apa prioritas pemerintah untuk mencapai pengembangan kualitas sumber daya manusia yang terkait Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan investasi di sektor ini pendidikan dan kesehatan diharapkan investasi di bidang ini berdampak meningkatkan sumber daya manusia dan mengurangi kemiskinan. Pratama & Utama (2019) peran aktif pemerintah diharapkan berperan aktif dalam pengelolaan dan pengembangan sektor publik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pengeluaran pemerintah merupakan produk manufaktur yang mendukung keputusan pemerintah untuk menghasilkan barang dan jasa publik bagi masyarakat masyarakat.

Kemiskinan hampir menjadi masalah di seluruh wilayah Indonesia. Di samping itu sebagai tujuan pembangunan nasional Indonesia semakin baik untuk dapat menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan rakyat Indonesia salah satu tujuan pembangunan nasional yaitu menurunkan garis kemiskinan. Menurut (Roebyantho, 2013) kemiskinan merupakan masalah global di semua negara berkembang dan berkembang. Negara-negara berkembang di sebagian Asia dan Afrika terlibat dalam program pengentasan kemiskinan. Sementara itu, negara-negara maju memiliki minat yang besar untuk membahas kemiskinan karena kondisi di negara-negara berkembang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan politik mereka. Singkatnya, kemiskinan menjadi perhatian semua bangsa dan musuh utama (*common enemy*) umat manusia di dunia. Menurut (Misdawita & Sari, 2013) kemiskinan didefinisikan sebagai keadaan di mana kebutuhan dasar tidak dapat dipenuhi, seperti: sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan hidup serba kekurangan yang dialami oleh seseorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum atau yang dapat diterima

dalam hidupnya. Saptatiningsih et al., (2015) kemiskinan merupakan masalah global, seringkali terkait dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan dalam berbagai situasi kehidupan. Beberapa orang mungkin memahami istilah ini secara subjektif dan relasional, sementara yang lain melihatnya dari perspektif moral dan yudisial, dan yang lain memahaminya dari perspektif ilmiah.

Di Indonesia, kemiskinan masih menjadi masalah besar yang perlu diselesaikan. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masih menghadapi masalah kemiskinan. Meskipun merupakan salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif baik, namun tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Selatan masih cukup tinggi. Berdasarkan data resmi yang dikeluarkan BPS tahun 2019, penduduk miskin provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 767,80 jiwa, yaitu 8,69 persen dari total penduduk provinsi Sulawesi Selatan. Di salah satu wilayah Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Luwu, jumlah penduduk miskin Luwu meningkat menjadi 46.180 jiwa pada tahun 2019 dan jumlah tersebut menurun sebanyak 140 jiwa pada tahun 2020. Menurut BPS, masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah mendasar yang menjadi fokus perhatian pemerintah semua negara.

Tabel 1. Gambaran Data Investasi Swasta, Pengeluaran Pemerintah Dan Tingkat Kemiskinan Tahun 2015 – 2017 Kab. Luwu

Tahun	Investasi swasta	Pengeluaran Pemerintah	Kemiskinan
2015	72,251,4	1.145.226.03	13,89
2016	520,065.80	1.522.886.67	14,35
2017	408,504.40	1.323.625.24	13,98

Berdasarkan data BPS dan *National Single Window for Investment* (NSWI), terlihat bahwa jumlah sektor investasi swasta sebanyak 72.251,4 pada tahun 2015 dan meningkat pada tahun 2016 sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan. Data yang terkumpul pada belanja negara adalah belanja langsung dan belanja tidak langsung data dari tahun 2015 hingga 2017 dan meningkat pada tahun 2016. Peningkatan belanja publik secara tidak langsung berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Namun faktanya, peningkatan belanja publik tidak membantu mengurangi kemiskinan. Angka kemiskinan di Kabupaten Luwu tidak stabil setiap tahun pada tahun 2015-2016. Hal ini menunjukkan bahwa model penanggulangan kemiskinan provinsi Sulawesi Selatan tidak dibangun berdasarkan kinerja penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan dalam strategi politik provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak investasi swasta dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Luwu Raya tahun 2014 dan 2021.

Investasi adalah total pengeluaran perusahaan dan pemerintah untuk pembelian barang modal berwujud, baik untuk memulai bisnis baru maupun untuk memperluas bisnis yang sudah ada, dengan tujuan menghasilkan keuntungan yang melebihi biaya modal investasi (Rizka Juita Rachim, 2013). Investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga meningkatkan kapasitas produksi menurut (Ramayani, 2013) peningkatan investasi memicu percepatan pertumbuhan ekonomi, karena peningkatan investasi berimplikasi pada peningkatan investasi atau pembentukan modal. Peningkatan investasi atau pembentukan modal mengarah pada peningkatan produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Peningkatan produksi barang dan jasa menyebabkan percepatan pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah mengacu pada uang yang dikeluarkan pemerintah untuk barang dan jasa atau barang lainnya. Contohnya adalah pengeluaran untuk operasional dan investasi dalam layanan publik seperti pertahanan, pendidikan, jaminan sosial, dan kesehatan. Selain itu, beberapa pengeluaran dimungkinkan tanpa pertukaran barang dan jasa seperti biaya transfer. Selama defisit anggaran, pengeluaran publik melebihi pendapatan pemerintah. Sebaliknya, jika pendapatan melebihi pengeluaran, negara menghasilkan surplus. Dan ketika pengeluaran sama dengan pendapatan, kita menyebutnya sebagai *balanced fiscal*. Pengeluaran pemerintah sangat penting untuk mempengaruhi

perekonomian. Terlepas dari konsumsi swasta, investasi perusahaan dan ekspor neto, itu membentuk permintaan umum. Sehingga perubahan tersebut berdampak pada perekonomian. Ketika permintaan meningkat, permintaan agregat meningkat dan kami berharap ekonomi tumbuh lebih cepat. Sebaliknya, ketika pemerintah memotong pengeluaran, permintaan agregat turun dan begitu pula perekonomian. Menurut Baeti et al., (2013) dalam penelitian (Guritno, 1993) pengeluaran pemerintah adalah nilai pengeluaran pemerintah digunakan untuk kepentingan masyarakat. mencerminkan pengeluaran pemerintah kebijakan pemerintah. Ketika pemerintah menetapkan kebijakan untuk pembelian barang dan jasa, pengeluaran publik mencerminkan biaya yang ditanggung pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Eliza (2015) Wagner berpendapat bahwa dalam perekonomian di mana pendapatan per kapita meningkat, pengeluaran pemerintah meningkat secara proporsional. Hukum Wagner dikenal sebagai "hukum perluasan pengeluaran pemerintah". Undang-undang tersebut didasarkan pada pengamatan empiris dari negara-negara maju (AS, Jerman, Jepang). Dalam hal ini Wagner menjelaskan mengapa peran pemerintah meningkat, terutama karena pemerintah harus mengatur hubungan-hubungan yang muncul dalam masyarakat.

Pemahaman tentang makna kemiskinan sangat berbeda-beda, keragaman definisi kemiskinan bersumber dari fakta bahwa masalah ini telah menjadi multidimensi, yaitu kemiskinan mengacu pada dimensi kebutuhan manusia yang berbeda. Ketidakmampuan memenuhi standar hidup minimum sesuai kriteria kelayakan dapat dianggap sebagai kemiskinan (Wahyudi & Rejekingsih, 2013) dalam penelitian (Todaro, 2006). Menurut (Annur, 2013) kemiskinan disebut masalah sosial dan bahkan masalah sosial yang paling kompleks dan sulit, karena kemiskinan membawa serta berbagai jenis gangguan terhadap kehidupan sosial. Hal ini tercermin dari kenyataan bahwa sebagian besar kejahatan terkait langsung atau tidak langsung dengan kemiskinan. Misalnya, pencurian dan perampokan berhubungan langsung dengan kemiskinan, kasus-kasus seperti pengangguran dan kesehatan yang buruk dan segala akibatnya berhubungan secara tidak langsung jatuh miskin karena masyarakat miskin tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan makanan yang bergizi. Menurut (Bidara Pink, 2018) Secara etimologis, "kemiskinan" berasal dari kata "miskin", yang berarti "tidak ada kekayaan". Badan pusat statistik mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak. Kemiskinan juga merupakan kondisi yang berada di bawah kebutuhan minimum makanan dan non-gizi, yang dikenal sebagai garis kemiskinan (*poverty line*). Menurut (RI, 2019) kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup. Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan pangan. Akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat disuatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya.

Semua daerah termasuk Luwu Raya membutuhkan peran penting pemerintah karena kehidupan masyarakat selama ini bergantung pada pelayanan pemerintah. Jika pengeluaran pemerintah dialokasikan untuk sarana dan prasarana yang dilaksanakan selama ini, maka pemerintah harus mengintervensi berfungsinya perekonomian. Peran belanja publik adalah untuk membiayai setiap kesempatan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat didukung oleh kelancaran penyelenggaraan pelayanan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, lokasi penelitian dilakukan di Luwu Raya selama periode penelitian 2014-2021. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Luwu Raya di Provinsi Sulawesi Selatan dijadikan sebagai sampel. Sumber data ini adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian. Data sekunder adalah data dari sumber lain yang berperan sebagai

data pendukung. Jumlah tersebut berasal dari hasil penelitian yang dilakukan sejauh terkait dengan tujuan penelitian tersebut untuk mendapatkan hasil dan data yang lebih baik dari BPS dan *National Single Window for Investment* (NSWI). Metode penelitian ini menerapkan metode kuantitatif. Beberapa metode analisis regresi linier digunakan untuk menganalisis data yaitu asumsi klasik dan data deret waktu menggunakan SPPS.

Yakni

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Kemiskinan

α = Konstanta

X1 = investasi swasta

X2 = pengeluaran pemerintah

e = *Standart error* (Variabel Pengganggu)

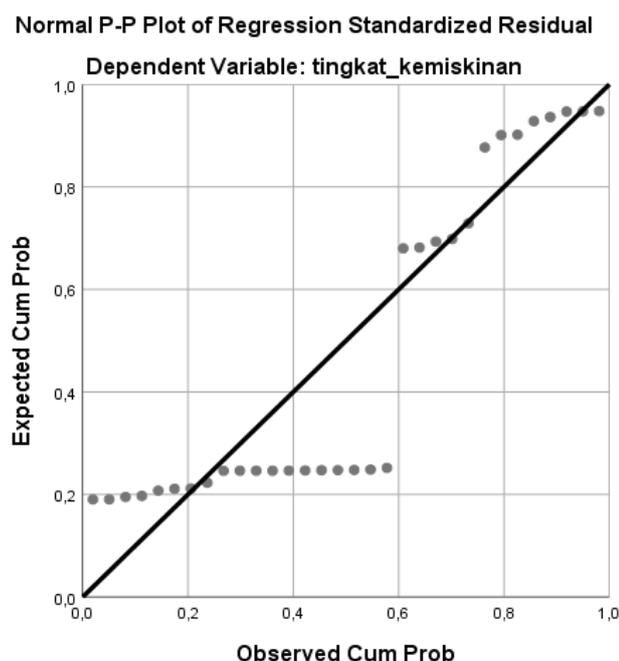
Dalam pengujian analisis regresi linier berganda dilakukan uji simultan (F) dan parsial (T), sehingga selama penelitian tidak boleh ada kesalahan yang konsisten pada hasil data yang diperbolehkan. Ada beberapa langkah untuk mengikuti tes yaitu 4 tes standar klasik yang hasilnya harus dilalui, kemudian dapat dilakukan tes selanjutnya yaitu empat tes standar klasik yaitu: Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas adalah suatu jenis uji yang bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya sebaran suatu distribusi data dalam sekumpulan data atau variabel.



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Sumber : hasil pengolahan data 2023, SPSS

Pada gambar di atas, data dapat dikatakan normal jika elemen butiran-butiran mengikuti garis diagonal (normal P-plot).

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas adalah keadaan dimana variabel X bebas berkorelasi satu sama lain.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

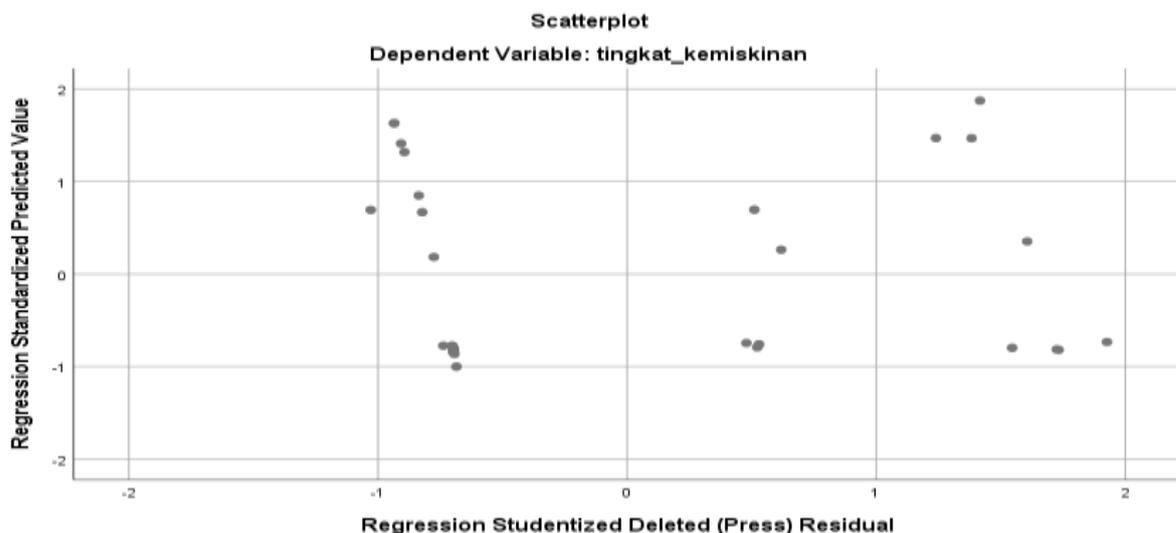
Model	Correlations			Tolerance	VIF
	Partial	Part			
1 (Constant)					
Investasi_swasta	,001	,001		1,006	1,006
pengeluaran_pemerintah	,081	,081		1,006	1,006

Sumber : hasil pengolahan data 2023, SPSS

Uji multikolinearitas jika toleransi $> 0,10$ dan VIF < 10 , maka tidak ada hasil multikolinearitas. Mempertimbangkan nilai toleransi dan VIF 1,006 dan 1,006, dapat disimpulkan bahwa hasilnya tidak menimbulkan perbedaan atau anomali apapun.

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang menentukan apakah terdapat variasi residual yang melekat pada semua pengamatan dalam model regresi linier.



Gambar 2. Hasil Uji Heterokedastisitas

Sumber : hasil pengolahan data 2023, SPSS

Jika asumsi heteroskedastisitas salah, model regresi tidak valid sebagai alat analisis. Pada gambar di atas, heteroskedastisitas terlihat ketika sumbu Y lebih banyak dari pada sumbu X pada titik 0.

Uji Autokorelasi

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi
 Change Statistics

Model	df2	Sig. F Change	Durbin-Watson
1	29	,908	2,200

Sumber : hasil pengolahan data 2023, SPSS

Berdasarkan hasil uji autokorelasi terlihat bahwa nilai atas *Durbin-Watson* adalah 2.200 yaitu angka relevan berdistribusi $2+ > 0,05$ maka dapat dikatakan tidak terdapat autokorelasi pada model regresi

Pengujian Hipotesis

Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi investasi swasta dan belanja publik terhadap angka kemiskinan di Luwu Raya. Analisis ini diperlukan untuk mencari persamaan regresi sederhana yaitu $Y = a + bX_1 + bX_2 + e$ yang komponennya (a,b) diperoleh dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 23.

Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan hasil analisis regresi atas penilaian investai swasta dan pengeluaran pemerintah yang dapat dilihat dari table berikut ini:

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	415,490	171,264		2,426	,022
Investasi_swasta	3,001	,000	,001	,005	,996
pengeluaran_pemerintah	8,296	,000	,081	,438	,665

Sumber : hasil pengolahan data 2023, SPSS

$$Y = 415,490 + 3,001X_1 + 8,296X_2 + e$$

1. nilai konstanta/ alfa = 415.490

Nilai diatas merupakan nilai konstanta/alpha dengan nilai 415,490 yang berarti nilai ini konstan atau tetap jika variabel investasi swasta dan pengeluaran pemerintah tidak berubah.

2. Nilai koefisien $Bx_1 = 3,001$

Nilai 3.001 bernilai positif, artinya jika investasi swasta meningkat maka kemiskinan akan menurun.

3. Nilai koefisien $Bx_2 = 8,296$

Nilai 8,296 bertanda positif yang berarti angka kemiskinan akan menurun ketika belanja publik meningkat.

Uji Simultan F

Tabel 5. Hasil uji simultan F
ANOVA^a

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	74829,200	2	37414,600	,097	,908 ^b
	Residual	11224301,186	29	387044,868		
	Total	11299130,386	31			

Sumber : hasil pengolahan data 2023, SPSS

Untuk hasil uji F variabel investasi swasta dan pengeluaran pemerintah hasil nilai F hitung 0,097 < F table 3,33 dengan nilai signifikan sebesar 0,908 > 0,05. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Uji Parsial T

Tabel 6. Hasil Uji Parsial T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	415,490	171,264		2,426	,022
Investasi_swasta	3,001	,000	,001	,005	,996
pengeluaran_pemerintah	8,296	,000	,081	,438	,665

Sumber : hasil pengolahan data 2023, SPSS

Diketahui nilai sig. untuk investasi swasta sebesar 0,996 > 0,05 dan nilai T hitung sebesar 0,005 < t tabel 2,042 , sedangkan nilai sig. untuk pengeluaran pemerintah adalah sebesar 0,665 > 0,05 dan nilai T thitung sebesar 0,438 < t table 2,042 jadi dapat di tidak ada pengaruh kedua variabel bebas terhadap variabel terikat.

Koefesien Determinasi (R²)

Tabel 7. Hasil Uji Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R	Std. Error of the	Change Statistics
-------	---	----------	------------	-------------------	-------------------

			Square	Estimate	R Square Change	F Change
1	,081 ^a	,007	-,062	622,12930	,007	,097

Sumber : hasil pengolahan data 2023, SPSS

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, nilai *adjusted* R square adalah sebesar 0,007 atau 7%. Jadi pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y sebesar 7% dan selebihnya di pengaruhi oleh faktor lain sebanyak 93%.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, terlihat jelas bahwa variabel investasi swasta tidak berpengaruh terhadap angka kemiskinan di Luwu Raya, dimana ketika investasi meningkat maka kemiskinan juga meningkat, hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa kemiskinan akan mengalami penurunan jika investasi naik atau meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Suharlina, 2020) menyatakan bahwa peningkatan investasi tidak berdampak positif terhadap kemiskinan karena peningkatan investasi dapat mengurangi kemiskinan di Kalimantan Barat. Ini karena investasi yang ada Di Luwu Raya, sebagian besar dari mereka bekerja di sektor perkebunan yang lebih padat karya, yang menyerap tenaga kerja lebih banyak dibandingkan sektor lainnya. Mempekerjakan pekerja ini biasanya berketerampilan rendah, sehingga mereka diklasifikasikan sebagai pekerja tidak terampil dan menerima upah rendah. Rendahnya upah para pekerja ini berarti bahwa mereka tidak dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dan dengan demikian berkontribusi pada peningkatan kemiskinan. Menurut (Wahyudi & Rejekingsih, 2013) jika merujuk pada teori lingkaran setan kemiskinan versi Nurse, maka menunjukkan bahwa keterbelakangan adalah sesuatu yang harus dipatahkan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Ketertinggalan dan keterbelakangan dapat diatasi dengan memberikan pendidikan yang diselenggarakan oleh negara kepada warga negaranya untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang dapat mengurangi keterbelakangan dan ketertinggalan daerah. Pendidikan juga merupakan *human capital*, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula produktivitasnya, karena semakin banyak pengetahuan dan informasi yang diperoleh. Peningkatan produktivitas ini meningkatkan baik pendapatan individu maupun pendapatan nasional. Peningkatan pendapatan pribadi meningkatkan kapasitas konsumsi mereka dan dengan demikian mengangkat hidup mereka keluar dari kemiskinan.

Di salah satu wilayah diLuwu Raya yaitu Kabupaten Luwu Utara, kemiskinan meningkat cukup tajam pada tahun 2021 akibat banjir bandang tahun 2020 dan pandemi COVID-19, mengakibatkan tidak berfungsinya kegiatan ekonomi masyarakat, rusaknya infrastruktur dan banyaknya lahan pertanian akibat bencana yang melanda. Sehingga peningkatan investasi di Luwu Raya hanya menguntungkan segelintir orang, bukan pekerja itu sendiri, sehingga menambah angka kemiskinan.

Variabel pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap angka kemiskinan, semakin tinggi pengeluaran maka semakin rendah angka kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori bahwa kemiskinan akan berkurang ketika belanja publik meningkat atau meningkat.

Namun peningkatan pengeluaran pemerintah di Luwu Raya tetap tidak mengurangi tingkat kemiskinan di Luwu Raya karena pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat miskin masih berada di ujung yang salah atau masih belum tepat sasaran. Menurut (Nasrudin, n.d.) pemerintah menyediakan layanan publik secara terjangkau karena tidak berorientasi pada keuntungan, tidak seperti bisnis. Rumah sakit dan sekolah pemerintah hadir untuk menyediakan layanan dan menjangkau mereka yang tidak mampu mengakses pendidikan dan kesehatan swasta yang mahal. Namun nyatanya masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkannya. Menurut (Misdawita & Sari, 2013) masalah terbesar kemiskinan adalah kemampuan kerja masyarakat miskin memperoleh pelayanan untuk kebutuhan hidupnya, seperti kesempatan memperoleh pelayanan kesehatan dan

pendidikan. Di sini, peran pemerintah dalam pembelanjaan memfasilitasi aksesibilitas publik akses pelayanan publik yang buruk.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pendahuluan, landasan teori metodologi dan hasil uji hipotesis serta pembahasan, maka dapat di simpulkan bahwa:

Investasi swasta tidak ada pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Luwu Raya tahun 2014-2021. Sedangkan pengeluaran pemerintah tidak ada pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Luwu Raya tahun 2014-2021.

Pemerintah telah melaksanakan beberapa rencana untuk mengatasi masalah kemiskinan, namun hingga saat ini belum ditemukan solusi yang dapat mengatasi masalah ini sejak awal.

Oleh karena itu, ada beberapa saran untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama, misalnya dengan menambah dan menggunakan variabel di luar variabel bebas dalam penelitian ini, menambah jumlah sampel yang akan diteliti dan memperpanjang masa penelitian.

DAFTAR RUJUKAN

- Annur, R. A. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kecamatan Jekulo Dan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2013. *Economics Development Analysis Journal*, 2(4), 409–426.
- Astuti, T. W. (2013). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Kesejahteraan Sosial Terhadap Pembangunan Manusia Sumatera Utara. *Unimed*, 122(1), 37–40. <http://digilib.unimed.ac.id/13428/5/708532088> BAB I.pdf
- Baeti, N., Jurusan, Pembangunan, E., Ekonomi, F., & Juli, D. (2013). PENGARUH PENGANGGURAN, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2007-2011 Info Artikel. *Edaj*, 2(3), 85–98.
- Bidara Pink. (2018). Data Baru BPS : Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Berkurang. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1), 1–6.
- Eliza, Y. (2015). Pengaruh Investasi, Angkatan Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Pekbis*, 1(1), 200–210.
- Harry A. P. Sitaniapessy. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB dan PAD. *Jurnal Economia*, 9(1), 40.
- KHAMILAH, H. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Kalimantan Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 1(2), 314–324. <https://doi.org/10.20527/jiep.v1i2.1140>
- Misdawita, & Sari, A. A. P. (2013). Analisis Dampak Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Pendidikan, Kesehatan, Dan Pengeluaran Subsidi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 4, 147–161.
- MS, M. Z. (2017). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi. *EKONOMIS: Journal of Economics and Business*, 1(1), 180. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v1i1.18>
- Mustafa, S. W. (2019). Pengaruh Investasi Swasta Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata Dikota Palopo. *Journal of Institution and Sharia Finance*, 2, 30–39.
- Nasrudin, A. (n.d.). Pengeluaran Pemerintah: Komponen dan Efek Terhadap Perekonomian. In *Cerdasco*. <https://cerdasco.com/pengeluaran-pemerintah/>
- Nofiyani, R. (2018). *Pengaruh Investasi Swasta Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan*

- Ekonomi Di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam tahun 2011-2016*. 1–139.
- Pratama, N. R. N. S., & Utama, M. S. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 8 [7](2337–3067), 651–680.
- Ramayani, C. (2013). Pengaruh Investasi Pemerintah, Investasi Swasta, Inflasi, Ekspor, Tenaga Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Economica*, 1(2), 203–207. <https://doi.org/10.22202/economica.2013.v1.i2.120>
- RI, M. K. (2019). No Title EΛENH. *Ayan*, 8(5), 55.
- Rizka Juita Rachim. (2013). *Analisis Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta Dan Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran Terbuka*. 1–23.
- Roebyantho, H. (2013). Kebijakan Penanganan Kemiskinan Melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube). *Sosio Informa*, 18(2), 117–132. <https://doi.org/10.33007/inf.v18i2.68>
- Saptatiningsih, R. I., Nugrahani, T. S., & Rejeki, S. (2015). Pemberdayaan Perempuan Desa untuk Mengurangi Kemiskinan. *Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta*, 512–524.
- Suharlina, H. (2020). *Pengaruh Investasi , Pengangguran , Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Serta Hubungannya dengan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat*. 56–72.
- Wahyudi, D., & Rejekingsih, T. W. (2013). Analisis kemiskinan di Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Economics*, 2(1), 1–15.